

Jurnal Ilmu Komunikasi
ULTIMACOMM

Vol 8, No. 1

ISSN: 2085 - 4609 (Print), e- ISSN 2549-4007

Journal homepage: <http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM>




Performa Media, Jurnalisme Empati, dan Jurnalisme Bencana: Kinerja Televisi Indonesia dalam Peliputan Bencana (Kasus Liputan TV One terhadap Hilangnya Air Asia QZ 8501)

Ignatius Haryanto

To cite this article:

Haryanto, Ignatius (2016). Performa Media, Jurnalisme Empati, dan Jurnalisme Bencana: Kinerja Televisi Indonesia dalam Peliputan Bencana (Kasus Liputan TV One terhadap Hilangnya Air Asia QZ 8501). *Jurnal UltimaComm*, 8(1), 77-89

 [Submit your article to this journal](#) 

Published in Partnership with



Full Terms & Conditions of access and use can be found at
<http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/about>

Performa Media, Jurnalisme Empati, dan Jurnalisme Bencana: Kinerja Televisi Indonesia dalam Peliputan Bencana (Kasus Liputan TV One terhadap Hilangnya Air Asia QZ 8501)

Ignatius Haryanto

Universitas Multimedia Nusantara

Email: ignatius.haryanto@umn.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini hendak memaparkan telaah terhadap TV One sebagai salah satu televisi berita di Indonesia, apakah ia melakukan kinerjanya sesuai dengan konsep performa media seperti yang dikemukakan oleh McQuail (1992), dan juga konsep jurnalisme empati sebagaimana digagas oleh Ashadi Siregar (2002). Tulisan ini memaparkan tema di atas dengan menggunakan metode studi kasus dan memilih secara khusus liputan TV One atas hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501, kemudian dibahas dalam kerangka jurnalisme bencana serta panduan etis yang dirumuskan dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran / Standar Program Siaran). Peristiwa hilangnya pesawatnya Air Asia QZ 8501 pada akhir Desember 2014 menunjukkan TV One, lebih mengutamakan kecepatan penyampaian berita serta menekankan unsur sensasionalisme, ketimbang mempertimbangkan pemberitaan seperti apa yang sebaiknya diterima oleh para penonton. Tulisan ini mencoba menyoroti bagaimana TV One memberitakan tragedi Air Asia tersebut khususnya pada saat tayangan *Breaking News* mereka di mana TV One memberitakan soal penemuan mayat terapung di lautan beberapa hari setelah kecelakaan terjadi.

Kata Kunci: berita televisi, jurnalisme bencana, jurnalisme empati

ABSTRACT

This research aims to present an analysis toward TV One as one of Indonesian television stations, whether it works in line with the concept McQuail's media performance and the concept of empathy journalism coined by Ashadi Siregar. TV One coverage on the missing Air Asia QZ 8501 is purposively selected to be analysed using case study method. The data collected is analyzed based on disaster journalism perspective and ethical guide on Broadcasting Code of Conduct and Program Standards (P3SPS). The missing Air Asia QZ 8501 at the

end of December 2014 shows TV One prioritized speed and sensationalism in delivering the story, rather than considering on the kind of news that ideally received by the audience. This articles highlights the way TV One covered the Air Asia tragedy, mainly on its breaking news which reported the finding of floating dead bodies on the ocean few days after the accident.

Keywords: television news, disaster journalism, empathy journalism

PENGANTAR

Untuk suatu negeri yang terbilang memiliki banyak potensi terjadinya bencana alam, kecelakaan, atau pun tragedi lainnya, ternyata televisi di Indonesia belum siap untuk bisa melaporkan aneka peristiwa itu dengan objektif, profesional dan mengikuti standar etika yang ada. Paling tidak itulah yang dapat kita simpulkan dari pemberitaan berbagai media pemberitaan jika terjadi peristiwa-peristiwa tragis seperti bencana alam, kecelakaan transportasi, ataupun peristiwa sejenis lainnya.

Yang lebih mengemuka kemudian adalah persaingan untuk menghasilkan berita yang sensasional dan menyorongkan berita yang mengundang isak tangis ketimbang suatu pemberitaan yang komprehensif, objektif serta profesional. Secara praktis, kita pun banyak melihat banyak ketidaksiapan ditunjukkan oleh para reporter di lapangan yang mendapat perintah dari kantor pusat di Jakarta, dan reporter terlihat tidak profesional serta tidak dapat *perform* atas tugas yang diterima. Tidak sensitifnya reporter terasa ketika mereka diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum waktunya, ataupun tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh para korban atau keluarga korban dari kejadian tragis itu.

Tulisan ini hendak memaparkan bagaimana performa yang ditunjukkan oleh TV One, salah satu televisi berita di Indonesia yang melaporkan peristiwa hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501 dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura, pada akhir Desember 2014. Setelah liputan beberapa hari terus ditayangkan, di tengah ketidakpastian informasi yang ada, TV One menampilkan *breaking news* tentang penemuan jenazah yang diduga salah seorang penumpang dari Air Asia tersebut. Layar TV One jelas menampilkan jenazah tersebut dan tayangan ini pun segera mengundang komentar dan protes dari sejumlah kalangan, yaitu keluarga korban, masyarakat umum, pengamat media, regulator media, dan di kalangan jurnalis sendiri.

Tulisan ini hendak memaparkan studi kasus yang diteropong lewat konsep-konsep Performa Media yang dikemukakan oleh McQuaill (1992), konsep Jurnalisme Empati yang telah dirumuskan oleh Ashadi Siregar (2002), dan menaruhnya juga dalam kerangka Jurnalisme Bencana serta pedoman perilaku dunia penyiaran yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3SPS).

TINJAUAN LITERATUR

Performa Media

Media Performance atau performa media adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh Dennis McQuail, seorang profesor komunikasi asal Belanda, yang pada intinya merujuk pada pengertian *public journalism* atau *public communication*. Asumsi dasar dari konsep Performa Media di sini adalah diperlukannya semakin banyak media memberikan perhatian dalam kondisi masyarakat informasi seperti sekarang untuk menampilkan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik secara luas (McQuail, 1992, p. 1). Media dituntut untuk terus menampilkan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, walaupun diakui oleh McQuail bahwa kategori yang dipergunakan untuk menilai kinerja media massa bisa sangat beragam dan dari satu tempat ke tempat lain yang mempergunakan konsep yang sama, bisa menghasilkan perbedaan penafsiran.

Performa media di sini sangat erat kaitannya dengan konsep "*public communication*" yang merujuk pada keterkaitan yang rumit antara transaksi yang bersifat informatif, transaksi yang bersifat ekspresif, serta transaksi yang bersifat solidaritas, yang terjadi dalam *public sphere* (ruang publik) atau di tempat yang dipergunakan oleh kalangan masyarakat umum. Ruang yang disebut di sini, kini bisa diterjemahkan dalam bentuk *channel* (kanal) atau jaringan komunikasi massa, serta juga ruang dan waktu yang dipergunakan oleh media untuk membahas hal-hal yang menarik perhatian masyarakat luas (McQuail, 1992, p. 2). McQuail juga meminjam pengertian yang disampaikan oleh Ferguson (1990) tentang komunikasi publik sebagai: "proses pertukaran informasi dan budaya antara institusi media, produk media dan masyarakat umum, yang dibagikan secara luas, tersedia untuk dibagi, dan memiliki karakter komunal."

Dalam mengoperasionalkan konsep performa media, McQuail menggunakan empat kategori besar sebagai parameter: *independensi media*, *diversivitas* (keberagaman) *media*, *objektivitas media*, serta *kontribusi media pada tatanan sosial dan budaya* (1992, p. 18)

Independensi media (McQuail 1992, p. 99-111) umumnya merujuk pada kondisi struktural di mana media berada, dan umumnya hal ini merujuk pada bagaimana kebebasan media dijamin di suatu negara, apakah itu ada jaminan dalam bentuk konstitusi, ataupun hukum media lain yang ada.

Menyangkut *diversivitas* (keberagaman) media, McQuail (1992, p. 141-159) menyebutkan bahwa kelahiran dari konsep keberagaman tersebut datang dari versi Barat, apa yang disebut sebagai masyarakat modern: adanya individualisme, perubahan, kebebasan berpikir, dan kebebasan bergerak.

Menurut McQuail (1992, p. 184-185) objektivitas media merujuk pada sejumlah elemen yaitu keberimbangan dalam mempresentasikan kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu isu, akurasi dan kesungguhan atas reportase yang dilakukan, mempresentasikan seluruh hal penting yang relevan, pemisahan antara fakta dan opini, namun juga memberikan porsi untuk opini sejauh relevan, meminimalkan pengaruh sikap, pendapat atau keterikatan dari penulis terhadap masalah yang ditulis, serta menghindari sudut pandang atau tujuan yang menipu. Sementara jika berbicara tentang *kontribusi media pada tatanan sosial dan budaya* merujuk pada peran yang bisa dibawakan media untuk menghasilkan tatanan masyarakat yang teratur, damai, bermartabat, dan juga menumbuhkan adanya solidaritas sosial di antara masyarakat (McQuail 1992, p. 237-274).

Tentang Jurnalisme Empati

Menurut penulis, gagasan soal *Media Performance* yang dikemukakan oleh McQuail perlu lebih diperdalam jika kita hendak membahas bagaimana performa media dalam peliputan bencana seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Untuk itu, penulis mengambil konsep jurnalisme empati yang dikemukakan oleh Ashadi Siregar (2002).

Ashadi Siregar ketika mengemukakan konsepnya terutama merujuk pada kritiknya terhadap media massa di Indonesia yang melakukan peliputan atas situasi penyebaran virus HIV/AIDS yang kerap kali menaruh posisi penderita atau pengidap virus ini dalam kondisi yang dikorbankan. Untuk melawan kondisi tersebut, maka Siregar mengutarakan gagasan soal jurnalisme empati, agar membuat para peliput peristiwa ini lebih memiliki perhatian terhadap mereka yang diliput, untuk tidak jatuh pada suatu penghakiman sepihak kepada para korban. Untuk menariknya dalam konteks peliputan bencana, penulis hendak mengambil konsep dasar jurnalisme empati ini, untuk melakukan penilaian seperti apa performa televisi kita pada saat meliput bencana, dan apakah media cukup sensitif ketika mengangkat sejumlah peristiwa yang traumatis tersebut.

Ashadi Siregar, yang pernah menjadi pengajar jurnalistik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyebutkan bahwa jurnalisme empati berupaya untuk mengajak wartawan untuk selalu mencurigai kekuasaan yang melatari relasi sosial dalam setiap situasi sosial (2002, p. 43). Pencurigaan ini menurut Siregar merujuk pada kecurigaan yang harusnya selalu diberikan pada kekuasaan sebagaimana disarankan oleh Lord Acton, mengenai kecenderungan kekuasaan yang korup. Namun untuk konteks jurnalistik, maka kecurigaan harusnya ditujukan pada "korupnya kekuasaan dalam interaksi sosial [yang] akan membawa korban manusia."

Bagian lain yang tidak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah metode dalam mengeksplorasi kenyataan. Siregar menganjurkan bahwa pada saat wartawan mengeksplorasi kenyataan, dan ada seorang korban yang dijadikan subjek berita, maka sudah sepantasnya wartawan berupaya mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban dilakukan dengan menggunakan metode partisipatoris. Dengan metode ini, seorang jurnalis berusaha untuk memasuki kehidupan subjek dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai mengganggu kehidupan subjek (Siregar, 2002, p. 43).

Untuk itu Siregar mengajukan pertanyaan "Manakala korban ditetapkan sebagai subjek berita, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban?" Atau jika sikap ini ditarik dalam persoalan etika, maka jurnalis perlu untuk bisa menjawab pertanyaan ini: "Pada saat menjadikannya [subjek] sebagai informasi, jurnalis tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi subjek?" Dengan begini, jurnalisme empati membawa konsekuensi dalam *framing* (membangkitkan) suatu kenyataan sosial, bahwa di dalam setiap kenyataan selamanya berlangsung interaksi antar manusia, dan dalam setiap interaksi secara potensial dapat ditemukan korban.

Penilaian atas performa media lewat jurnalisme empati

Apa yang disebutkan dalam jurnalisme empati sebagaimana dikutip di atas sebenarnya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh McQuail tentang solidaritas dan identitas sosial yang dikembangkan oleh media (1992, p. 263). McQuail menyebutkan ada tiga hal yang menjadi prinsip utama dari tatanan sosial sebagaimana ditampilkan oleh media, yaitu:

1. Merujuk pada *support* yang diberikan media kepada aspirasi dan identitas dari sub grup dari masyarakat, apakah dengan cara representasi yang positif atau dengan cara kesempatan untuk mengakses dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kelompok

budaya yang minoritas dan masyarakat akan saling terlibat dalam pengalaman bersama di mana informasi dan dukungan budaya dari media akan menjadi sangat penting.

2. Prinsip solidaritas di sini juga merujuk pada semua aspek dari performa media yang melibatkan perpanjangan bentuk simpati secara simbolik kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang sedang mengalami masalah di mana hal ini akan meningkatkan masyarakat akan nilai kemanusiaan yang bersama-sama mereka jaga.
3. Prinsip solidaritas dalam media juga bisa merujuk pada proses di mana media yang telah disebut sebagai "pro sosial" menampilkan isi media yang meneguhkan nilai sosial yang positif, seperti perilaku yang baik, kepedulian kepada yang lain, keterlibatan masyarakat, dan lain-lain.

Penjabaran McQuail tersebut di atas memberikan dimensi yang lebih luas dari apa yang telah dirumuskan oleh Ashadi Siregar sebagai jurnalisme empati, karena McQuail menaruhnya dalam suatu konteks di mana media massa juga bersolidaritas kepada anggota masyarakat yang lain, yang dalam konteks Ashadi digambarkan sebagai korban, dan kelompok masyarakat yang dianggap minoritas atau terkucil pun tetap merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Jurnalisme Bencana

Di sini penulis hendak menambahkan suatu konsep lagi yang terkait dengan peliputan bencana, yaitu jurnalisme bencana, yang merujuk pada bagaimana sikap dan praktik yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis dalam peliputan bencana. Ahmad Arif menulis dalam bukunya (2010) sejumlah kritik pedas terhadap praktik liputan jurnalistik media di Indonesia dalam liputan bencana. Khusus yang disorot oleh Arif adalah liputan media terkait bencana tsunami di Aceh pada akhir 2004, kemudian bencana di Padang pada 2009.

Arif sendiri tak membuat suatu definisi khusus apa yang ia sebut sebagai jurnalisme bencana, tetapi jika kita hendak merumuskan kembali sejumlah poin yang ia sampaikan dalam epilog bukunya, maka jurnalisme bencana terkait dengan sejumlah hal berikut ini (2010, p. 163-169):

1. Wartawan mengenali lingkungan sekitar di mana bencana terjadi. Pengenalan terhadap kondisi ini terkait dengan pengenalan terhadap ancaman bencana, peta bencana, dan jalur evakuasi.

2. Wartawan yang meliput peristiwa bencana harus merespons peristiwa ini dengan cepat. Respons yang dapat dilakukan adalah dengan memverifikasi berita soal bencana (dalam hal ini gempa) kepada pihak yang berwenang, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Setelah itu, wartawan atau tim wartawan juga harus memiliki ketahanan mental dan fisik yang memadai untuk diterjunkan ke daerah bencana, dengan mendapatkan pelatihan tertentu sebelumnya.
3. Wartawan harus terus mengingatkan bagaimana pentingnya mitigasi bencana, terus mendorong pembuatan sistem peringatan dini tsunami.
4. Wartawan harus memiliki persiapan untuk diterjunkan ke lokasi bencana, misalnya terkait dengan kesiapan logistik yang mendukung peliputan bencana.
5. Wartawan juga harus memahami batas dirinya, karena dalam situasi bencana, segala macam penyakit, baik fisik maupun mental, sangat mudah berjangkit. Di sini pihak kantor media juga harus paham akan kondisi ini sehingga penugasan terhadap wartawan ke lapangan juga mempertimbangkan unsur-unsur ini.
6. Wartawan juga harus dirotasi dalam peliputan bencana, sehingga tidak satu dua orang saja yang diterjunkan ke wilayah tersebut, tanpa ada suatu rotasi atau penggantinya. Hal ini untuk memastikan bahwa wartawan peliput bencana tetap sehat secara fisik dan mental.
7. Wartawan yang meliput korban harus memiliki empati. Dikatakan "dengan keterbukaan sikap dan berempati kepada para korban, kemungkinan untuk menemukan narasumber yang mau berbicara akan jauh lebih besar". Lebih jauh juga dikatakan "hadapi korban bencana sebagai narasumber dengan rasa hormat, *compassion*, dan jangan pernah memaksa mewawancarai mereka atau mengambil foto/gambar mereka bila mereka tidak bersedia."
8. Wartawan pada saat menampilkan para korban perlu untuk bisa menampilkan tulisan, gambar, ataupun siaran yang menyentuh dan bisa menggalang solidaritas, tetapi tidak sadis: mendeskripsikan kehancuran, namun tidak menimbulkan trauma. Mengapa hal demikian perlu dilakukan? "Liputan kita (para wartawan, maksudnya -IH) terhadap peristiwa bencana yang dramatik akan berdampak mendalam terhadap pembaca, penonton atau pendengar. Sebagian pembaca atau pemirsa barangkali adalah anak-anak yang rentan mengalami trauma dengan kengerian dan kesadisan yang ditampilkan secara telanjang."

Setelah dipaparkan soal jurnalisme bencana, maka konsep ini merupakan konsep yang sejalan dengan jurnalisme empati sebagaimana diterangkan pada bagian sebelumnya. Hal ini juga terkait dengan bagaimana performa media kita dalam peliputan bencana.

Regulasi atas lembaga penyiaran dalam peliputan bencana di Indonesia

Dalam dunia penyiaran di Indonesia, sebenarnya sudah ada pengaturan soal bagaimana lembaga penyiaran atau televisi meliput peristiwa bencana. Hal ini tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur permasalahan penyiaran di Indonesia (pasal 1 Ketentuan Umum, ayat 13). Komisi Penyiaran Indonesia sendiri muncul dengan adanya UU Penyiaran nomor 32/2002 di mana pada pasal 8 dikatakan bahwa KPI memiliki kewenangan, antara lain untuk:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dengan kewenangan yang dimiliki KPI ini, maka P3SPS memiliki bagian khusus soal Peliputan Bencana yang tertuang pada bab XVIII tentang Prinsip-prinsip Jurnalistik, yang pada bagian 4 berbunyi:

Pasal 25

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. *melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;*
- b. *tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;*
- c. *menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;*

- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.

Sementara itu dalam Standar Program Siaran pada bab XVIII tentang Program Siaran Jurnalistik, Bagian Enam tentang Peliputan Bencana berbunyi demikian:

Pasal 49

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.

Pasal 50

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:

- a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;
- c. mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;
- d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan *close up*; dan/atau
- e. menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

TV One dan liputan korban Air Asia QZ 8501

TV One sebagai salah satu televisi khusus pemberitaan di Indonesia telah mewarnai dunia penyiaran Indonesia sebagai hasil *rebranding* dari *LATVI* yang sebelumnya dimiliki oleh pengusaha dan mantan menteri tenaga kerja, Abdul Latief (Rachmawati, 2008). Pada Februari 2008, *LATVI* berganti nama menjadi *TV One*, dan orientasi isinya pun berubah dari penyiaran yang bersifat *variety television* menjadi *news television*. Dengan demikian, *TV One* adalah televisi kedua yang memproklamkan dirinya sebagai televisi berita di Indonesia, setelah *Metro TV*.

Walau *TV One* mengusung dirinya sebagai televisi berita, namun kerap kali penyampaian berita di *TV One* dikritik orang untuk sejumlah liputan seperti liputan penangkapan teroris di Kota Temanggung, Jawa Tengah dan liputan bencana yang dianggap kurang peka atau simpati kepada para korban. Sebagai contohnya, Arif (2010, p. 139-140) menyebutkan bagaimana tidak sensitifnya

seorang reporter *TV One* saat meliput gempa di Padang, Sumatera Barat pada akhir September 2009 dan menyiarkannya secara langsung.

Sikap tidak sensitif terlihat dari pertanyaan sang reporter kepada seorang bapak dari korban gempa di Padang tersebut. Utamanya, pertanyaan tersebut terkait dengan perasaan si bapak jika anaknya dinyatakan tewas. Pertanyaan tersebut diulang-ulang dan sang reporter mencecar si bapak yang dalam kondisi sedih dan tidak siap menjawab pertanyaan dengan lebih lengkap.

Pada akhir Desember 2014, sebuah pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8501 terbang dari Kota Surabaya menuju ke Singapura. Penerbangan yang dilaksanakan pada Minggu pagi tersebut tak pernah dikabarkan mencapai tujuan. Dua jam setelah waktunya pesawat tiba di lokasi, barulah banyak pihak ada sesuatu yang tidak beres dengan penerbangan ini. Dalam waktu sekejap banyak awak media memenuhi bandar udara Djuanda, Surabaya, sebagai tempat awal penerbangan, dan saat itu pihak keluarga pun sudah mulai berkumpul dengan kondisi yang harap-harap cemas atas ketidakpastian (BBC, 2015).

Pihak *Search and Rescue* (SAR) Indonesia segera bergerak untuk melakukan pencarian dari rute yang diperkirakan dilewati oleh penerbangan tersebut. Setelah beberapa hari pencarian, mulailah ditemukan titik terang ketika sejumlah bagian pesawat ditemukan di perairan kawasan Kalimantan Tengah, dan menyusul setelah itu adalah para korban penumpang dan awak pesawat lainnya. Pada saat pencarian tersebut, *TV One* dalam salah satu tayangannya menyiarkan *breaking news* (berita terbaru) yang menampilkan sosok mayat yang terapung di lautan dalam kondisi yang tidak mengenakan busana. Tayangan tersebut didapat oleh *TV One* dan segera disiarkan. Namun penyiaran tayangan tersebut mendapat reaksi keras dari publik, serta para anggota keluarga penumpang Air Asia tersebut.

Untuk kesekian kalinya, *TV One* mendapatkan protes dari publik terkait dengan penayangan penemuan mayat korban penerbangan Air Asia ini dan dianggap tidak sensitif terhadap para keluarga korban. Penayangan ini pun mendapat kritik dan sinisme dari sejumlah media internasional yang turut meliput kecelakaan pesawat tersebut (Simanjuntak, 2014).

Tak hanya itu, KPI pun memberikan teguran kepada *TV One*, bersama dengan dua stasiun televisi lainnya, yaitu *Metro TV* dan *TVRI*, terkait dengan penayangan gambar mayat tersebut (Priatmojo, 2014).

PEMBAHASAN

Tidak dapat dimungkiri bahwa dunia lembaga penyiaran kita saat ini penuh dengan persaingan sengit antarstasiun satu dengan stasiun lainnya. Perlombaan kecepatan dalam penyampaian berita menjadi perlombaan yang menegangkan dan menentukan reputasi suatu stasiun dibandingkan stasiun lainnya.

Walau lembaga penyiaran kita ada dalam suasana persaingan sengit tersebut, namun hal ini bukanlah menjadi alasan untuk mengurangi sikap dan perilaku etis yang harusnya dimiliki oleh media dan wartawan yang meliput peristiwa bencana demikian. Jika dikembalikan pada konsep McQuail tentang performa media, khususnya bagian tentang *kontribusi media pada tatanan sosial dan budaya*, maka yang dilakukan oleh *TV One* sangat jauh dari peran media sebagai "penghasil tatanan masyarakat yang teratur, damai, bermartabat, dan juga menumbuhkan adanya solidaritas sosial di antara masyarakat."

Dikembalikan pada konsep jurnalisme empati yang telah dijelaskan di depan, maka terlihat bahwa media (khususnya *TV One*) tidak berupaya untuk menunjukkan sikap etis, walaupun di sini media dan jurnalis telah berusaha untuk memasuki kehidupan subjek (Siregar, 2002, p. 43). Pertanyaan yang diajukan Siregar "pada saat menjadikannya [subjek] sebagai informasi, jurnalis tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi subjek?" dalam praktiknya dijawab dengan sikap dan kerja kurang etis oleh para wartawannya.

Dalam konteks jurnalisme bencana, maka apa yang telah dilakukan oleh *TV One* tidak memperhitungkan dampak penggambaran yang sadis yang dapat menimbulkan trauma dari mereka yang menontonnya. Kemungkinan bahwa tayangan tersebut bisa saja ditonton oleh anak-anak yang bisa saja mengalami trauma dengan kengerian atau kesadisan yang ditampilkan secara telanjang (Arif, 2010, p. 169).

Cara *TV One* menampilkan tayangan tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman para wartawan dalam peliputan bencana masih jauh dari memadai. Dengan melihat banyaknya peristiwa bencana di sekitar kita, maka makin penting adanya makin banyak wartawan dan media yang punya pemahaman menyeluruh dalam kaitan peliputan bencana demikian. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan tanggung jawab peliputan media kepada publiknya, sehingga untuk itu publik mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Namun, di sisi lain juga mendapatkan informasi visual yang telah melewati proses seleksi untuk memeriksa tayangan seperti apa yang bisa dan tidak disiarkan.

Isi dari P3SPS yang sudah dikutip di atas memberikan panduan kepada para jurnalis televisi dan stasiun televisinya untuk memperhatikan cara menampilkan pemberitaan terkait dengan bencana untuk turut dalam upaya pemulihan para korban, mengurangi atau menghilangkan trauma para korban. Apa yang sudah diatur dalam P3SPS tersebut sudah cukup memadai, namun persoalannya bagaimana para jurnalis ataupun lembaga penyiaran memperhatikan masalah ini sehingga bisa memberikan informasi yang akurat, sehat dan aman untuk ditonton oleh khalayak penonton di Indonesia.

Publik sebagai pihak yang menjadi tujuan penayangan berita dari suatu televisi tentu berharap mendapatkan pemberitaan yang bisa dipercaya, memenuhi kaidah etik, dan menghormati para penontonnya dengan tayangan yang layak. Jika publik melihat suatu stasiun televisi tidak memenuhi kriteria demikian, maka bukan tak mungkin publik akan meninggalkan stasiun tersebut dan memilih stasiun televisi lainnya.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa *TV One* sebagai salah satu televisi berita di Indonesia belum mengedepankan konsep jurnalisme empati. Ini menunjukkan bahwa performa media yang ditunjukkan stasiun ini masih jauh dari pembelaan terhadap kepentingan publik melalui pemberitaan yang objektif, profesional, dan menunjukkan empatinya pada korban dan keluarga korban dalam peristiwa hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501. Pengutamaan *TV One* atas kecepatan penyampaian berita dan penonjolan sisi sensasionalisme ini mengabaikan pedoman penyiaran seperti yang diatur dalam P3SPS khususnya yang terkait dengan jurnalisme bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ahmad (2010). *Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- BBC (2015). AirAsia QZ 8501 Terbang Terlalu Tinggi. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150120_airasia_terbangtinggi
- Komisi Penyiaran Indonesia (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 2012*, Jakarta.
- Simanjuntak, Laurencius (2014). Media Asing Sindir TV One Tayangkan Jasad Ngapung Korban AirAsia. Diakses dari

<http://www.merdeka.com/peristiwa/media-asing-sindir-tvone-tayangkan-jasad-ngapung-korban-airasia.html>

McQuail, Dennis (1992), *Media Performance: Mass Communication and Public Interest*. London: Sage.

Priatmojo, Dedi (2014). KPI 'Tegur' Tiga Televisi Soal Tayangan AirAsia. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/573696-kpi-tegur-tiga-televisi-soal-tayangan-airasia>

Rachmawati, Yunita (2008). Berubah Jadi TV One, Lativi Ganti Format. Diakses dari <http://www.kapanlagi.com/showbiz/televisi/berubah-jadi-tvone-lativi-ganti-format-0e7du.html#>

Siregar, Ashadi (2002). *AIDS, Gender dan Kesehatan Reproduksi: Pintu Menghargai Manusia bagi Media*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Pelatihan dan Penerbitan Yogyakarta.

